

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/ 596 /Kep/413.013/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;



KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/ 596 /Kep/413.013/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;



KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/ 596 /Kep/413.013/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;



KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/ 596 /Kep/413.013/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;



KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/ 596 /Kep/413.013/2006

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Menetapkan, **PERTAMA**

Menunjuk Sdr. FADELI, SH., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. SUHERMAN, SH., MM., Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan, NIP. 010 204 393 sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan spesimen tanda tangan sebagaimana

tersebut dalam lampiran.

KEDUA

Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

a. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran;

- b. Bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya kegiatan ;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan Pada Tanggal 11 Desember 2006

> **BUPATI LAMONGAN** ttd. MASFUK

Salinan disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

- 2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
- 3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Boionegoro:
- 4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bojonegoro ;
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
- Badan/Dinas/Kantor/Bagian di 6. Sdr. Kepala Kabupaten Pemerintah Lingkungan Lamongan:
- Bank Jatim Cabang 7. Sdr. Pemimpin PT. Lamongan:
- 8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
- 9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya An. BUPATI LAMONGAN

ASISTEN TATA PRAJA

ub.

Kepala Bagian Hukum

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Menetapkan, PERTAMA

Menunjuk Sdr. FADELI, SH., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. SUHERMAN, SH., MM., Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan, NIP. 010 204 393 sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA

Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

a. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran;

b. Bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya kegiatan;

c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan Pada Tanggal 11 Desember 2006

> BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK

Salinan disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

 Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro;

4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bojonegoro ;

5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

7. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Lamongan;

8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;

9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya An. BUPATI LAMONGAN KAASISTEN TATA PRAJA

> ub. Kepala Bagian Hukum

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Menetapkan, PERTAMA

Menunjuk Sdr. FADELI, SH., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. SUHERMAN, SH., MM., Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan, NIP. 010 204 393 sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA

Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

a. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran;

- b. Bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya kegiatan;
- c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan Pada Tanggal 11 Desember 2006

> BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK

Salinan disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro ;

4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bojonegoro;

5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

 Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

7. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Lamongan;

8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;

9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya An, BUPATI LAMONGAN ASISTEN TATA PRAJA

`ub. ___Kepala Bagia**n** Hukum

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Menetapkan, PERTAMA

Menunjuk Sdr. FADELI, SH., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. SUHERMAN, SH., MM., Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan, NIP. 010 204 393 sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA

Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

a. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran ;

- b. Bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya kegiatan ;
 c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang
 - undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan Pada Tanggal 11 Desember 2006

> BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK

Salinan disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

- Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
- Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro;
- 4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bojonegoro ;
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- 7. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Lamongan;
- 8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;

9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya An. BUPATI LAMONGAN

ASISTEN TATA PRAJA

ub.

Kepala Bagian Hukum

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Menetapkan, PERTAMA

Menunjuk Sdr. FADELI, SH., MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Sdr. SUHERMAN, SH., MM., Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan, NIP. 010 204 393 sebagai Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2006 dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA

Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

a. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran;

- b. Bertanggung jawab atas keseluruhan terlaksananya kegiatan ;
- Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan Pada Tanggal 11 Desember 2006

> BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK

Salinan disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

Sdr. Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro;

4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bojonegoro ;

5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

7. Sdr. Pemimpin PT. Bank Jatim Cabang Lamongan;

8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;

9. Sdr. Pejabat dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya An. BUPATI LAMONGAN ASISTEN TATA PRAJA

> ub. Kepala Bagian Hukum

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Lampirar Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/596/Kep/413.023/2006 Tanggal : 11 Desember 2006

NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006

Na		Nama/Nip	Sebagai	Tanda Tangan	Paraf
No.		2	3	4	5
1.	Nip. : 0	ADELI, SH., MM. 10 097 696 ekretaris Daerah abupaten Lamongan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan		
2.	Nip. : 0 Jabatan : K	SUHERMAN, SH., MM. 10 204 393 Kepala Badan Keuangan Ian Barang Daerah Kabupaten Lamongan	Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan	A	V

BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK

Salinan sesuai dengan aslinya An. BUPATI LAMONGAN ASISTEN TATA PRAJA

ub.

Kepala Bagian Hukum

SEKRETARIAT DAE

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Lampirar Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/596/Kep/413.023/2006 Tanggal : 11 Desember 2006

NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006

<u> </u>	Nama/Nip	Sebagai	Tanda Tangan	Paraf
No.	Namarip 2	3	4	5
1.	Nama : FADELI, SH., MM. Nip. : 010 097 696 Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan		
2.	Nama : SUHERMAN, SH., MM. Nip. : 010 204 393 Jabatan : Kepala Badan Keuangar dan Barang Daerat Kabupaten Lamongan	Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan		V

BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK

Salinan sesuai dengan aslinya An. BUPATI LAMONGAN ASISTEN TATA PRAJA

ub.

Kepala Bagjan Hukum

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/596/Kep/413.023/2006 Tanggal : 11 Desember 2006

NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006

Ma		Nama/Nip	Sebagai	Tanda Tangan	Paraf
No.		2	3	4	5
1.	Nama Nip. Jabatan	: FADELI, SH., MM. : 010 097 696 : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan		
2.	Nama Nip. Jabatan	SUHERMAN, SH., MM.010 204 393Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan	Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan	An	V

BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK

Salinan sesuai dengan aslinya An. BUPATI LAMONGAN ASISTEN TATA PRAJA

ub.

Kepala Bagian Hukum

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Lampirarr Keputusan Bupati Lamongan

Nomor: 188/596/Kep/413.023/2006 Tanggal: 11 Desember 2006

NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006

	11 M1:-	Sebagai	Tanda Tangan	Paraf
No.	Nama/Nip	3	4	5
1.	Nama : FADELI, SH., MM. Nip. : 010 097 696 Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan		\.
2.	Nama : SUHERMAN, SH., MM. Nip. : 010 204 393 Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan	Pejabat Penandatangan SPM Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD Kabupaten Lamongan	A.	V

BUPATI LAMONGAN ttd. **MASFUK**

Salinan sesuai dengan aslinya An. BUPATI LAMONGAN

ASISTEN TATA PRAJA

ub.

Kepala Bagian Hukum

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/596/Kep/413.023/2006

Tanggal: 11 Desember 2006

NAMA-NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SPM UNTUK PROGRAM PRAKARSA PEMBARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH/P2TPD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2006

	N	Sebagai	Tanda Tangan	Paraf
No.	Nama/Nip	3	4	5
1.	Nama : FADELI, SH., MM. Nip. : 010 097 696 Jabatan : Sekretaris Daera Kabupaten Lamongan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran		V
2.	Nama : SUHERMAN, SH., MM Nip. : 010 204 393 Jabatan : Kepala Badan Keuang dan Barang Daer Kabupaten Lamongan	Penandatangan an SPM Program	Har	V

BUPATI LAMONGAN ttd. **MASFUK**

Salinan sesuai dengan aslinya An. BUPATI LAMONGAN ASISTEN TATA PRAJA

ub.

Kepala Bagian Hukum

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Pembina

Nip. 010 170 358